

BAB II SEJARAH DAN DINAMIKA SISTEM POLITIK TURKI

Turki merupakan negara yang terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Eropa. Perbedaan rezim pemerintahan dari tahun ke tahun turut berdampak pada corak pemerintahan Turki dari kekhilafahan Islam dimasa kejayaan Turki Utsmani hingga menjadi negara sekuler yang diprakarsai oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Dinamika sistem politik Turki turut diwarnai oleh aparat militer negara tersebut. Militer di Turki berperan sangat penting terhadap pergantian penguasa negara tersebut setelah meninggalnya Mustafa Kemal Attaturk. Sebagai pihak yang merasa berkewajiban untuk menjaga kelangsungan sekulerisme di Turki, militer menggunakan hal tersebut untuk menggulingkan rezim yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai sekulerisme.

A. Profil Umum Negara Turki



Gambar 2.1: Peta negara Turki.

Sumber: <https://www.geologinesia.com/2018/01/peta-negara-turki.html>

a) Letak Geografis Turki

Turki merupakan suatu negara berbentuk republik yang memiliki letak geografis strategis. Hal ini dibuktikan dengan letak negara yang mana ibu kotanya berada di Ankara ini berada dalam dua benua yaitu 97% terletak di benua Asia dengan kisaran luas wilayah 814.578 km² dan 3% wilayahnya lagi berada di benua Eropa. Turki sendiri adalah negara yang terletak di Anatolia dan Balkan. Anatolia merupakan semenanjung besar yang menyerupai persegi panjang dengan wilayah yang terletak sebagaimana jembatan antara Eropa dan Asia. Selain itu, Turki merupakan negara yang berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah Utaranya, di sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bulgaria, di sebelah Barat dengan Yunani dan Laut Aegea, sedangkan di Timur laut berbatasan dengan Georgia, di Timur Turki berbatasan dengan Armenia, Azerjiban, dan Iran, lalu Irak dan Suriah berada di Tenggara negara tersebut, serta di sebelah Selatan negara ini berbatasan dengan Laut Mediterania (www.kemlu.go.id).

Dengan letaknya yang cukup strategis, Turki menjadi negara yang memiliki percampuran antara kebudayaan Timur dan juga kebudayaan Barat, hal ini disebabkan oleh sejarah yang dimiliki negara tersebut yaitu adanya fakta bahwa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan imperium Turki Ustmani dan pengaruh negara-negara Barat modern (Mu'ammam, 2016). Berdasarkan hasil survei tahun 2018, penduduk di Turki telah mencapai angka 81,916,871 juta dengan mayoritas penduduknya yaitu sekitar 99,8% beragama Islam Sunni dengan sisanya beragama Kristen dan Yahudi (KJRI Istanbul) sehingga hal ini membuktikan bahwa peradaban Islam di Turki sangat kuat.

Turki memiliki 81 Provinsi dengan Ankara sebagai ibukota dari negara tersebut. Namun, Istanbul tidak dapat dipisahkan dari negara ini karena memiliki arti penting tersendiri bagi Turki. Sebelum berpindah ke Ankara, Ibu Kota Turki terletak di Istanbul dengan nama asli kota tersebut yaitu

Bizantium. Nama Bizantium merujuk pada Kaisar Romawi Konstantin I yang menjadikannya ibu kota Kekaisaran Romawi pada 11 Mei 330 M yang kemudian jatuh pada Kekaisaran Ottoman pada 29 Mei 1453. Pada 13 Oktober 1923, ibu kota Turki dipindahkan ke Ankara (mediaindonesia.com, 2016). Lokasi kota Ankara yang merupakan kota terbesar kedua di Turki sangat strategis yaitu di Asia Barat, sementara daratan Turki 97% berada di Asia Barat maka hal tersebut akan membuat Mustafa Kemal Attaturk yang menjadi pemimpin Turki pada saat itu lebih mudah untuk mengontrol pemerintahannya dari Barat ke Timur daripada saat ibu kota Turki masih berada di Istanbul sehingga hal tersebut menjadi faktor kepindahan ibukota negara tersebut (www.republika.co.id, 2017).

b) Kondisi Sosial Turki

Penduduk di Turki mulai memeluk agama Islam sekitar abad 9 atau 10 Masehi. Pasca penyerangan Bangsa Mongol, mereka meninggalkan wilayahnya dengan dipimpin oleh Sulaiman hingga bermukim di tepian sungai Eurfrat. Setelah sepeninggalan Sulaiman, pimpinan pelarian tersebut digantikan oleh anaknya yaitu Orthogul. Saat kelompok tersebut sampai di dekat negeri Angora atau yang kini dinamai Ankara, pertempuran pasukan Bani Saljuk di bawah pimpinan Sultan Alauddin melawan pasukan Mongol sedang terjadi yang kemudian membawa mereka turut serta dalam pertempuran tersebut bersama-sama dengan tentara Bani Saljuk mengalahkan tentara Mongol tersebut. Setelah berhasil memenangkan pertempuran tersebut, Sultan Alauddin yang merupakan penguasa Bani Saljuk memberikan wilayah dekat Broessa (Iski Shahr) beserta wilayah sekitarnya yang saat ini dinamakan Anatolia.

Saat ini bangsa Turki didefinisikan sebagai penduduk Republik Turki. Pada catatan sejarah awal, definisi Bangsa Turki adalah “individu manapun di Republik Turki; apapun kepercayaannya atau latar belakang etnisnya; yang berbicara bahasa Turki, mengenal budaya Turki dan memiliki faham

idealisme Turki, adalah seorang bangsa Turki.” Namun saat ini bangsa Turki dinyatakan sebagai penduduk Republik Turki. Definisi bangsa Turki masa kini dicetuskan oleh Bapak Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Kini, istilah Bangsa Turki digunakan untuk penduduk Turki, dan juga penduduk berbahasa Turki di bekas wilayah Kesultanan Utsmaniyah dan komunitas Turki yang tersebar di Eropa, Amerika Utara dan Australia.

Wilayah negara Turki merupakan wilayah yang telah diduduki oleh berbagai peradaban sejak lama yaitu salah satunya bangsa Het yang merupakan salah satu peradaban kuno terlama di dunia hingga akhirnya muncul kedatangan bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Arab, dan Asia dimana orang Turki sendiri merupakan bangsa yang berasal dari Asia Tengah. Orang Turki mulai menduduki wilayah tersebut pada tahun 1000 M sebelum akhirnya menjadi penduduk mayoritas. Selain itu terdapat pula Bangsa Kurdi yang tinggal di bagian Tenggara wilayah negara ini dan kemudian menjadi kelompok minoritas terbesar yaitu berkisar 20% dari total populasi seluruh penduduk. Bahasa resmi negara ini adalah Bahasa Turki yang sempat beberapa lama menggunakan huruf Arab dalam penulisaannya sebelum akhirnya menggunakan penulisan Romawi yang telah dimodifikasi. Mayoritas penduduk negara ini beragama Islam sehingga banyak ditemukan masjid di berbagai wilayahnya.

Cara hidup orang Turki menggabungkan tradisi Eropa dan Asia seperti penampilan dan pakaian mayoritas penduduknya. Namun ciri khas Asia pada makanan, seni dan kerajinan, serta cerita rakyat Turki tetap ada. Hidangan favorit orang Turki adalah kebab shish yang merupakan potongan kecil daging domba atau sapi dan bawang yang dipanggang di atas panggangan arang. Selain itu yang cukup terkenal dari Turki adalah kopinya dimana mereka pertama kali belajar membuat kopi di Yaman pada tahun 1500-an pasca keberhasilannya menaklukkan Semenanjung Arab. Mereka mengangkut kopi ke Turki dan kemudian memperkenalkannya

ke Eropa. Turki Eropa dan pesisir Turki Asia memiliki musim dingin yang ringan, sejuk, dan berhujan, sedangkan musim panas hangat dan kering. Suhu musim dingin jarang turun di bawah titik beku, dan embun beku serta salju jarang terjadi. Suhu musim panas rata-rata 24 °C. Pantai barat mendapat sekitar 650 milimeter curah hujan setiap tahunnya. Di timur, curah hujan jauh lebih tinggi (Erwin, 2014; Siregar, 2017).

Bahasa Turki berawal dari bahasa orang-orang Oguz yang hijrah hingga ke Anatolia lalu kemudian mengalami perubahan-perubahan. Orang-orang kelompok ini memulai penyebarannya dari Anatolia sampai Selat Bosporus. Kemudian bahasa penduduk Turki mulai mengalami perubahan setelah Islam menjadi agama mayoritasnya akibat penyerapan kosakata-kosakata bahasa Arab juga Persia. Pada abad 15 tepatnya pada masa kekhilafahan Ustmaniyah, bahasa Turki ditulis dengan sejenis huruf Arab yang kemudian beberapa tahun kemudian Mustafa Kema Attaturk mengganti tulisan tersebut menjadi huruf Latin yang telah dimodifikasi sebagai upaya untuk mensekulerkan negara Turki agar seperti negara-negara Barat. Bahasa yang juga disebut sebagai Osmanli ini telah menjadi bahasa resmi negara Turki, Siprus, Siprus Utara, Makedonia, Kosovo. Selain itu, juga diajarkan di sekolah-sekolah komunitas Turki di Bulgaria, Yunani, Makedonia dan Rumania. Bahasa Turki terbagi atas beberapa dialek, seperti dialek Danubia yang banyak dituturkan oleh masyarakat di wilayah Balkan, Gaziantep, Sanliurfa, Edirne, Razgrad, Dinler, Rumelia, Ka ramanli dan Eskisehir (Erwin, 2014; Siregar, 2017).

B. Dinamika Sistem Politik Negara Turki

Sebagai negara yang pernah diduduki oleh peradaban-peradaban besar, Turki menjadi negara yang memiliki sejarah yang cukup lengkap. Seperti yang telah disebutkan di poin sebelumnya, Turki sempat diduduki oleh Kerajaan Romawi Timur pada tahun 395 hingga 1453 M dimana kota Istanbul yang kita ketahui pada saat ini dahulu bernama Byzantium

sebelum akhirnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman hingga 1922 M. setelah berakhirnya masa Kekaisaran Ottoman, Turki hingga sekarang berada pada periode Turki Modern dengan sistem pemerintahan yang sekuler dan demokratis. Sehingga sistem pemerintahan Turki ini dapat dibagi kedalam tiga periode, yaitu:

1. Periode Pra-Islam (395 M-1453 M)

Periode sebelum masuknya Islam ke Turki diawali dengan masuknya Kerajaan Romawi yang menduduki Turki sejak tahun 395 M. Pada saat itu ibu kota Turki berada di Konstantinopel yang mana kota tersebut berkembang cukup pesat dengan perdagangan dan kebudayaannya. Kependudukan Kerajaan Romawi ini mempengaruhi agama yang berkembang di Turki yaitu agama Kristen. Pada saat kependudukan Romawi Timur ini, Konstantinopel lebih dikenal dengan nama Byzantium. Kemudian Byzantium melemah dikarenakan adanya beberapa faktor.

Keruntuhan Byzantium berdasarkan faktor internal yaitu disebabkan oleh adanya perpecahan dalam gereja dimana Gereja Romawi Barat beranggapan bahwa tata cara ibadat yang dipraktikkan Romawi Timur tidak sesuai. Di sisi lain, Romawi Timur (Byzantium) tidak ingin mengakui ke-pausan Gereja Romawi Barat. Konflik internal ini terbawa hingga Perang Salib dimana tentara Salib justru menyerang Konstantinopel. Selain adanya konflik internal yang menimbulkan perang saudara, Kesultanan Turki Ustmani pada saat itu sedang mengalami peningkatan dengan ekspansi yang semakin meluas. Dengan memanfaatkan perang saudara antara Romawi Barat dan Romawi Timur, Sultan Muhammad II menjadi pelopor dari Kesultanan Ustmaniah untuk menaklukkan Konstantinopel (Monalisa, 2016).

2. Periode Islam

Awal mulai Turki memasuki Periode Islam ini ditandai dengan masuknya dua Dinasti Islam ke dalam wilayah negara tersebut yaitu Dinasti Seljuk dan Dinasti Ottoman. Orang-orang Seljuk merupakan orang Turki yang sebetulnya berasal dari Turkmenistan yang berkerabat dengan orang Uygur. Dinasti Seljuk mulai terlihat semakin berkuasa dengan dimulai adanya Perang Salib pertama. Dibawah kepemimpinan Alp Arselan dan Malik Syah yang memasuki Armenia, Asia Kecil, dan Syirah, kemudian berhasil menguasai kawasan Byzantium (al-Maghluts, 2010; Islamika, ganaislamika.com,2018).

Dinasti Islam selanjutnya yang memiliki pengaruh paling kuat pada Turki adalah Dinasti Ustmaniah atau disebut pula Dinasti Ottoman. Kekuasaan Dinasti Ottoman di Turki berlangsung sekitar 6 abad dimana permulaan kekuasaannya ini ditandai dengan keberhasilan Dinasti Ottoman merebut Konstantinopel dari Romawi Timur pada tahun 1453. Konstantinopel meruoakan wilayah yang sebelumnya sudah sangat berkembang sehingga dengan keberhasilan Dinasti Ottoman merebut wilayah tersebut membawa Dinasti Ottoman menjadi Dinasti yang cukup kuat di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur.

Pertama kali Dinasti ini berkuasa di Turki, Sultan Ustman I menjadi pemimpin pertamanya dengan membentuk pemerintahan yang formal yaitu sistem *Millet*. Sistem ini dikembangkan dengan maksud kelompok-kelompok agama dan suku minoritas mendapatkan hak otonom dalam hal mengurus urusan-urusan mereka sendiri dengan jaminan tak ada kontrol dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Turki pada saat itu banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam dan pengaruh ini juga termasuk dalam lingkup sosial juga lingkup politik. Pada masa itu, masyarakat Turki digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa Ulama dijadikan sebagai hukum, maka hal tersebut memposisikan

peran Ulama diurutan yang tinggi. Mufti¹ sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Maka dari itu, tanpa adanya persetujuan dari Mufti, suatu keputusan hukum kerajaan tidak dapat diberlakukan (Nata, 2011).

Kesultanan Ustmani melakukan ekspansi yang cukup luas hingga ke Eropa Timur namun di tiap-tiap wilayah yang didudukinya, Kesultanan Ustmani cenderung focus pada pendidikan keagamaan dan kebudayaan sehingga ketika negara-negara di Eropa mulai mengalami kemajuan dalam hal industri serta politik, banyak dari negara-negara tersebut yang berhasil melepaskan diri dari genggaman Kesultanan Ustmani. Pengaruh revolusi yang terjadi di Eropa juga berdampak terhadap Turki sehingga terjadi adanya transisi dari Periode Islam menjadi Periode Modern di Turki yang menjadi penanda berakhirnya kesultanan dan pemerintahan yang condong Islami di Turki (Amin, 2010).

3. Periode Modern

Pada periode modern, Turki tidak hanya mengalami perubahan dalam satu sistem saja tetapi terdapat beberapa perubahan yang diistilahkan dengan adanya tiga pembagian sistem politik yaitu Turki Lama, Transisi, dan Turki Modern (Sawaludin, 2017). Sebelum memasuki fase Turki Lama, sebelumnya terdapat revolusi pemerintahan yang merupakan penanda bagi runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani yang bertepatan pada Perang Dunia I. Namun, sebelum itu Kesultanan Turki Utsmani telah mengalami kemunduran sejak abad ke 17 tepatnya ketika negara-negara Eropa mulai muncul sebagai negara-negara Eropa Barat yang yang berkembang pesat di dunia.

¹ Mufti adalah pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. (Sumber: <https://kbbi.web.id/mufti>)

Hal tersebut mempengaruhi Turki untuk melakukan rekonstruksi pemerintahan dengan sesuatu yang baru. Namun dengan adanya usaha untuk mengadakan perubahan, Turki terpecah menjadi tiga golongan. Golongan pertama disebut juga sebagai golongan Barat yang mana ingin mengadopsi peradaban Barat sebagai dasar pembaharuan negara. Golongan selanjutnya adalah golongan Islamis yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar pembaharuan Turki. Golongan yang terakhir adalah golongan nasionalis yang tidak ingin kedua hal dari golongan-golongan yang sebelumnya disebutkan menjadi dasar pembaharuan (Nasution, 1982; Kholik, 2016).

Kesultanan Utsmani (Turki Utsmani) lebih tepatnya berakhir pada abad 20 dimana terjadi peristiwa kekalahan menghadapi tentara sekutu yang mana pada saat itu tentara Turki Utsmani bergabung dengan tentara Jerman. Dikala Turki mengalami masa-masa sulit, Mustafa Kemal muncul dengan menyelamatkan Turki dari kehancuran serta berhasil memproklamkan Negara Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Bersamaan dengan resminya Turki menjadi negara Republik, Mustafa Kemal Attaturk terpilih sebagai Presiden pertama negara tersebut (Nasution, 1982; Kholik, 2016).

Sebelum menjadi presiden Turki yang pertama, Mustafa Kemal berperan dalam membentuk Dewan Perwakilan Nasional dan beliau menobatkan dirinya untuk menjadi ketuanya. Dewan Perwakilan Nasional mengusulkan konsep yang memisahkan antara khilafah dengan Pemerintahan. Sehingga pada masa itu ada dua pemerintahan yaitu pemerintahan Khalifah di Istanbul dan Pemerintah Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional mengusulkan Mustafa Kamal Attaturk untuk menjadi ketua parlemen dan diharapkan dapat menyelesaikan kondisi krisis yang terjadi di Turki saat itu. Kemudian setelah resmi menjadi ketua parlemen, Mustafa Kemal mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem

khilafah menjadi Republik dengan dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh parlemen.

Mustafa Kemal Attarturk menganggap bahwa sistem kekhalifahan harus dilenyapkan karena sistem tersebutlah yang menyebabkan Turki hampir mengalami keruntuhan. Sehingga pada tanggal 3 Maret 1924 setahun setelah terpilihnya Mustafa Kemal Attarturk sebagai Presiden Turki, sistem kekhilafahan dihapuskan. Beberapa hal yang mendasari pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attarturk adalah westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme. Mustafa Kemal Attarturk beranggapan bahwa masyarakat Turki harus dibawa ke perubahan dengan mengadopsi peradaban Barat serta meninggalkan berbagai aktivitas bersifat reaksioner. Untuk mewujudkan westernisasi tersebut, harus ada upaya sekularisasi di Turki seperti yang pernah dilakukan Barat untuk terlepas dari *Dark Age* yaitu masa dimana Eropa belum berkembang akibat terkekang oleh peraturan Gereja. Upaya sekularisasi ini dilakukan dengan cara memisahkan agama dari kegiatan berpolitik yang didalamnya terkandung pembebasan institusi-institusi negara, struktur hukum, bahkan pendidikan dari pengaruh Agama (Syafe'i, 2010).

Turki mengalami sistem *mono-party* sejak awal berdirinya Republik Turki hingga tahun 1946 dimana hanya ada satu partai yaitu Partai Republik Rakyat yang didirikan oleh Mustafa Kemal Attarturk. Pada masa itu pendidikan menjadi hal utama yaitu sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai, politik dan budaya yang baru dengan tujuan untuk membentuk struktur kelembagaan. Lembaga-lembaga pendidikan pada saat itu wajib mendoktrinasi loyalitas terhadap prinsip-prinsip republik.

Sistem politik pada masa Mustafa Kemal disebut dengan istilah Kemalis yang merupakan perjuangannya sebagai pelopor transformasi sistem politik di Turki. Seperti yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya, Partai Rakyat Republik (PRR) menjadi satu-satunya partai

yang berkuasa di Turki dan partai ini telah memonopoli kekuasaan pada Kongres partai tahun 1931. Dengan adanya sistem monopartai ini membuat tersingkirnya parta-partai oposisi bahkan setelah Perang Dunia II berakhir pun partai oposisi tidak ada satupun yang aktif. Kekuasaan PRR pada saat itu bahkan tidak dapat digoyahkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Kurdi juga para emigrant (Zurcher, 2003; Machmudi, 2013). Pada masa ini Mustafa Kamal Attaturk sebagai pemimpin Turki mengadakan reformasi besar-besaran dalam tatanan kehidupan untuk menjadikan Turki sebagai negara sekuler yang bersifat modern.

Sesuai dengan maknanya, sekularisme dalam negara tersebut tentunya membuat peran agama terpisah dari ruang publik, sehingga agama hanyalah diperbolehkan untuk kepercayaan pribadi saja. Sejak tahun 1922 hingga 1935, sistem sekularisme ini diterapkan di Turki dengan melakukan reformasi terhadap tiga bidang penting yaitu: **Pertama**, sekularisasi negara, pendidikan dan hukum serta melemahkan pusat-pusat kekuatan tradisional ulama yang sudah memiliki lembaga; **Kedua**, menghapus simbol-simbol *religious* yang kemudian diganti dengan simbol-simbol peradaban Barat terutama Eropa; **Ketiga**, sekularisasi terhadap kehidupan Islam dan kehidupan sosial (Zurcher, 2003; Machmudi, 2013). Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada tahun-tahun pertama penerapan sekularisme di Turki adalah dengan menghapuskan sistem kekhilafahan yang merupakan perubahan terbesar yang terjadi di negara tersebut. Setelah adanya penghapusan sistem kekhilafahan, kemudian disusul pula dengan adanya penutupan sekolah berbasis Islam tradisional serta pengadilan agama pun turut ditutup. Dalam sistem ini kekuasaan negara didesain untuk dapat mengontrol agama tidak sekedar memasukkan agama kedalam ranah pribadi namun juga menyingkirkan agama dari ruang publik. Langkah yang dilakukan Mustafa Kemal pada saat itu adalah dengan mengontrol ulama dan

yang terikat dengan Sufi melalui beberapa cara seperti dengan memberlakukan undang-undang mengenai penyatuan sistem pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Aturan itu menjadi landasan hukum bagi penutupan seluruh madrasah dan pelimpahan seluruh urusan pendidikan pada kekuasaan kementerian pendidikan. Adanya aturan-aturan tersebut menyebabkan sekolah-sekolah yang tidak berbasis Islam tradisional pun mendapat pelarangan menggunakan bahasa Arab dan penanaman ajaran-ajaran agama Islam, selain itu pula bagi wanita yang memiliki jabatan di kursi public pun dilarang untuk menggunakan hijab dan atribut apapun yang menunjukkan diri sebagai muslim (Alfian, 2015).

Setelah berakhirnya periode kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk, Turki kembali mengalami perubahan dalam sistem politiknya yang dinamakan dengan sistem politik transisi. Pasca rezim Mustafa Kemal Attaturk, Turki mulai memasuki fase dimana tidak hanya terdapat satu partai saja yang berkuasa tetapi Turki mulai memberlakukan sistem multipartai sebagai solusi dari permasalahan pada tahun 1930an pada saat menjelang kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk berakhir yaitu masalah politik dan opini public mengenai kekuasaan di Turki. Awal mula dari sistem politik transisi ini adalah adanya kegagalan politik Mustafa Kemal pada saat itu dan juga dengan adanya kejenuhan akibat pemilihan umum yang tidak demokratis karena hanya bersifat formalitas saja. Hal tersebut dibuktikan dengan calon legislative yang bukan merupakan warga negara melainkan orang yang telah dipilih dari susunan yang dibuat ketua partai beserta jajarannya. Sebelum kekuasaannya berakhir, Mustafa Kemal kemudian mengurangi pembatasan partai oposisi sehingga mulai muncul partai oposisi yaitu Partai Republik Merdeka. Walaupun demikian, hal ini masih berupa formalitas belaka karena pada kenyataannya PRR tetap melakukan pengawasan terhadap partai oposisi dan

partai oposisi hanya diberikan sedikit kursi saja dari yang tersedia. (Zurcher, 2003).

Namun setelah berakhirnya masa kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk, perlahan-lahan muncul perubahan dalam sistem politik Turki. Pada masa ini Turki mulai membangun sistem demokrasi yang dapat mewakili aspirasi rakyat. Kemudian dalam sistem kepartaian mulai menggunakan sistem multipartai yang mana sebelumnya menggunakan sistem partai tunggal. Secara garis besar, struktur politik Turki meliputi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif Turki memiliki struktur ganda yaitu presiden Republik Turki dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Periode multi partai di Turki bermula pada Juli 1945 ketika seorang industrialis terkemuka di Istanbul, Nuri Demirag, mendirikan partai oposisi Milli Kalkinma Partisi (Partai Pembangunan Nasional) yang secara resmi terdaftar pada 5 September 1945. Terdapat partai lain yang tumbuh di Turki yaitu Demokrat Parti (Partai Demokrat) yang secara resmi terdaftar pada 7 Januari 1946. Ismet Inonu pada saat itu menjadi Presiden Turki menggantikan Mustafa Kemal Attaturk. Sebelum menjabat sebagai Presiden, sebelumnya Inonu merupakan Perdana Menteri Turki. Inonu menjadi pemimpin yang tetap melanjutkan kemalisme di Turki. Pada awalnya, Inonu berniat untuk tetap melanjutkan demokrasi semu dan juga tetap menjalankan tradisi partai yang hegemoni, namun terdapat tekana-tekanan yang kuat dari berbagai pihak agar melakukan perubahan konstitusi Turki untuk menerapkan demokrasi penuh. Akibat banyak tekanan, Inonu akhirnya menerima permintaan tersebut dan mengeluarkan kebijakan multipartai sehingga bermunculan partai-partai lain di Turki dengan jumlah yang cukup banyak baik partai berhaluan kanan maupun partai berhaluan kiri (Alfian, 2015).

Setelah Sistem Politik Transisi dilanjutkan dengan Sistem Politik Modern. Pada saat kudeta tahun 1980, militer merencanakan pemerintah Turki kedalam sistem politik demokratis. Militer mengumumkan bahwa parlemen dan kabinet telah dibubarkan dan bahwa imunitas para anggota majelis nasional (parlemen) telah diakhiri. Majelis yang beranggotakan 160 orang mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 1981. Anggota majelis diketuai oleh Profesor Orhan Aldikacti. Kudeta 1980 ini merupakan kudeta yang ketiga kalinya terjadi di Turki. Sebelum terjadinya kudeta 1980, dalam satu periode, Turki mengalami 11 kali pergantian Perdana Menteri yang menyebabkan stabilitas politik Turki menjadi tidak stabil. Hal ini kemudian menjadi momen bagi militer untuk melaksanakan kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Kenan Evren. Tidak seperti kudeta sebelumnya yang dilakukan pada 1970an, pada kudeta 1980 militer mengambil alih pemerintahan hingga tahun 1983 (Mohamad A. , 2017).

Pada masa itu dihasilkan sebuah draf yang menjelaskan bahwa pusat kekuasaan di tangan eksekutif dan menambah kekuasaan presiden serta dewan keamanan nasional. Pada tahun 1980 an partai Islam mulai berkembang di Turki dan Turki mengarah pada sistem politik yang demokratis. Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus (Sawaludin, 2017).

C. Militer dan Sistem Politik Turki

Militer di Turki merupakan pihak yang sangat menjunjung tinggi sekularisme di Turki dengan berpegang teguh pada doktrin bahwa militer Turki merupakan pelindung bagi berlangsungnya sekularisme di negara tersebut. Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam menjaga sekularisme

Turki, militer tidak segan untuk ikut campur terhadap perpolitikan negara. Ketika militer merasa adanya ancaman terhadap sekularisme seperti contohnya budaya Islam yang kembali menguat di Turki, maka militer akan melakukan upaya-upaya intervensi hingga upaya melakukan kudeta terhadap pemerintah.

Setelah wafatnya Mustafa Kemal Attaturk, multipartai mulai muncul di Turki dan hal ini juga menjadi masa bagi Islam di Turki untuk kembali muncul. Hal ini ditunjukkan dengan adanya partai-partai baru yang berhaluan Islam. Partai pertama yang mulai mencabut larangan Islam adanya partai CHP yang memasukkan kurikulum agama di sekolah serta memfasilitasi sekolah Imam Hatip. Tidak berhenti sampai disitu, di tahun 1950, Partai Demokrat memenangkan pemilu dan keberpihakan pemerintah terhadap Islam kembali dilanjutkan. Larangan adzan dalam bahasa Arab dihapuskan dan izin siaran membaca Al-Quran di radio pemerintah diberikan. Selain itu pendidikan keagamaan semakin diperluas serta adanya pembangunan ribuan masjid di Turki. Partai Demokrat mengetahui bahwa militer tentunya akan melakukan kudeta terhadap pemerintah karena telah membangkitkan kembali Islam di Turki, kemudian partai tersebut menyiasatinya dengan memberlakukan undang-undang tentang pencemaran nama baik terhadap Mustafa Kemal Attaturk. Seiring dengan berhasilnya Turki diterima dunia Barat pasca menjadi anggota NATO, Turki sempat mengalami kemerosotan ekonomi. Dengan adanya kemerosotan tersebut justru Partai Demokrat lebih menunjukkan keberpihakkannya pada Islam seperti kelompok *Nurcu*, pengikut Syaikh Said Nursi yang merupakan ulama sufi besar di Turki yang menolak sekularisme (Alfian, 2015).

Adanya keberpihakan yang terlihat jelas dari Partai Demokrat kepada tokoh-tokoh Islam di Turki menyebabkan munculnya reaksi negative dari militer. Kemudian di tahun 1960 menjadi tahun pertama militer melakukan kudeta terhadap pemerintah Turki. Pada tanggal 27 Mei 1960,

bersama dengan masyarakat pro-sekularisme Turki, militer melancarkan aksi kudeta dan menghukum Perdana Menteri Adnan Menderes. Perdana Menteri Adnan Menderes beserta dua menterinya dihukum mati dan kemudian posisinya diduduki oleh Jenderal Cemal Gursel hingga tahun 1965 (Mohamad A. , 2016). Meski Jenderal Cemal Gursel merupakan seorang militer, namun Gursel adalah salah satu pihak militer yang pro terhadap Islam sehingga pembangunan masjid dan gerakan keagamaan tetap berlanjut.

Partai CHP memenangkan pemilu Turki yang diadakan pada tahun 1961. Setelah kemenangan partai CHP tersebut, pemerintahan Turki mengalami jatuh bangun akibat adanya persaingan dengan oposisi yaitu Partai Keadilan yang kemudian memenangkan pemilu di periode selanjutnya pada tahun 1965 dan 1969. Pada tahun-tahun tersebut, parta dengan haluan sayap kanan dan sayap kiri bermunculan di Turki serta sayap paramiliter dan juga golongan Islam. Munculnya perpecahan dalam internal pemerintahan kembali menimbulkan adanya kudeta militer pada tahun 1971. Namun alasan kudeta ini dilancarkan juga akibat adanya tuntutan dari masyarakat mengenai perekonomian dan lapangan kerja di Turki. Hal ini menjadi alasan bagi militer untuk menertibkan kondisi Turki yaitu dengan menurunkan Perdana Menteri Suleyman Demirel (berasal dari Partai Keadilan).

Selanjutnya di tahun 1970an hingga tahun 1980an menjadi masa-masa yang sangat rumit di Turki akibat partai-partai baru semakin banyak yang bermunculan dengan latar belakang yang berbeda-beda serta konsentrasi ideologi yang juga berbeda. Banyaknya perbedaan yang terdapat pada partai-partai baru di Turki menyebabkan terjadinya konflik antar partai. Keadaan yang tidak stabil itu pula menyebabkan terjadinya sebelas kali pergantian Perdana Menteri di Turki. Selain itu, pada tahun 1979 disaat Demirel kembali berkuasa, kebijakan ekonomi IMF diimplementasikan kembali. Namun implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Turgut Ozal (Menteri Negara Urusan Ekonomi Bidang Perencanaan)

mengalami kemogokkan yang akhirnya menyebabkan Turki kembali mengalami kemerosotan ekonomi. Hal ini memberi sinyal bagi militer untuk kembali melakukan kudeta untuk ketiga kalinya pada tahun 1980 dipimpin oleh Jenderal Kenan Evren yang kemudian menjadi Presiden Turki pada tahun 1980 hingga 1989 (Hardoko, Sejak 1960, militer Turki Sudah Kerap Menggelar Kudeta, 2016).

Turki kemudian memasuki era Turgut Ozal yang membentuk program liberalisasi ekonomi dan menjadi tokoh yang berjasa dalam membangun kelas menengah muslim baru di Turki. Di masa-masa ini pula terdapat doktrin nasional Turki yaitu sistesis Turki dan Islam dimana hubungan kebangsaan Turki dan Islam menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian di pemilu tahun 1995, Partai Refah berhasil menang yang kemudian menjadikan Erbakan sebagai Perdana Menteri. Erbakan pada saat itu mengganti haluan yang semula Turki lebih mendekati diri pada Uni Eropa namun Turki dibawanya kearah negara-negara Arab dan negara-negara muslim. Hal ini tentunya membuat militer Turki kembali melakukan kudeta, namun kudeta kali ini tidak menampakkan penyerangan yang bersifat frontal seperti di tahun-tahun sebelumnya (Pijar Kecil Library, 2017). Kudeta ke empat yang dilakukan pada tahun 1997 ini lebih kearah peringatan militer terhadap Erbakan berbentuk rekomendasi yang mana pemberian rekomendasi ini tidak disertai dengan pilihan untuk menolak sehingga mau tidak mau Erbakan menyetujuinya. Akhirnya Erbakan turun dari jabatannya dan partai Refah dibubarkan (Hardoko, Sejak 1960, militer Turki Sudah Kerap Menggelar Kudeta, 2016).

Setelah dibubarkannya partai Refah, muncul Partai AKP yang merupakan pewaris dari partai-partai yang didirikan oleh Erbakan dengan corak partai-partainya Islamis. AKP tampil dengan corak Islamis yang lebih berbeda yaitu post-Islamis dimana tujuannya bukanya untuk formalisasi syariat Islam melainkan berupaya untuk mewujudkan nilai kebaikan universal dalam Islam. Partai AKP dengan corak post-

islamisnya tetap mendukung sekularisme di Turki namun menampilkan kader-kader beseta pemimpinnya yang religius. Partai AKP menjadi partai yang berhasil memenangkan pemilu berkali-kali dalam kurun waktu lima periode sejak kemenangan pertamanya di tahun 2002. Partai AKP memiliki citra yang baik di mata public Turki karena partai ini berisikan tokoh-tokoh yang religius sehingga mendapat simpati dari kalangan Islam, selain itu juga dengan Recep Tayyip Erdoga yang terkenal dengan kesuksesannya membenahi Istanbul serta pro demokrasi juga pro pasar bebas sehingga hal ini menunjukkan keberpihakan AKP pada kalangan sekuler-demokrat (Alfian, 2015). Selain itu, dengan upaya Erdogan menjadi salah satu pendukung hal tersebut karena perbedaannya dengan pendahulu yang condong mengarahkan negara tersebut lebih dekat dengan negara-negara Islam, justru Erdogan kembali mengarahkan Turki untuk lebih dekat pada Uni Eropa yaitu dengan cara mengupayakan kembali keanggotaan penuh dalam Uni Eropa.

Dalam upayanya untuk mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh Uni Eropa terutama perihal demokrasi yaitu hak asasi manusia dan control pemerintahan sipil terhadap militer menjadi kesempatan bagi AKP untuk mengurangi pengaruh militer terhadap perpolitikan Turki. Sehingga hal ini menyebabkan intervensi militer mau tidak mau harus dikurangi. Selain itu Erdogan menawarkan sekularisme pasif, maksudnya adalah sekularisme tidak dijadikan sebagai ideology yang mengekang aktivitas sipil. Contoh sekularisme pasif ini seperti mengembalikan hak wanita untuk menggunakan jilbab bahkan tidak hanya untuk kalangan warga biasa saja tetapi bagi wanita yang memiliki jabatan di pemerintahan. Hal ini dikatakan bahwa penggunaan jilbab bukanlah hanya kewajiban dalam sebuah agama tetapi juga sebagai bentuk ekspresi tiap wanita yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh HAM yang termasuk ke dalam demokrasi. Selain mengupayakan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, AKP juga menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Islam terutama

negara Timur Tengah selain karena letaknya yang berdekatan juga menjadikannya sebagai mitra perdagangan. Hubungan baik antara Turki dengan negara-negara Timur tengah tidak hanya sebata mitra strategis tetapi juga memberikan dukungan bagi konflik-konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah sehingga menaikkan citra Erdogan beserta AKP di mara Barat tetapi juga di dunia Islam. Tidak hanya membangun kerjasama yang baik dengan eksternal negara, kepemimpinan partai AKP selama ini telah berhasil membangun ekonomi Turki serta dapat menjaga stabilitas negara yang dibuktikan dengan kemenangan berkali-kali hingga sekarang.

Namun, kehadiran Erdogan dianggap sebagai penakluk sekularisme di Turki dengan tindakan Erdogan telah dikatakan melakukan reformasi secara fundamental mengenai sistem politik Turki. Meski begitu, Erdogan menunjukkan kepada dunia mengenai wajah baru Turki yang Islami namun masih tetap membuka diri terhadap negara lain (Siregar, 2017). Erdogan hadir disaat yang tepat, yaitu disaat keterpurukan politik yang melanda Turki dan Erdogan hadir dengan mengembalikan kepercayaan rakyat Turki bersama dengan partainya yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan, bahkan partai ini juga berhasil berada dalam puncak kekuasaan. Berkuasanya Partai Keadilan dan Pembangunan (Adelet ve Kalkinme Partisi- AKP) memberikan corak baru dalam pemerintahan Turki dengan alirannya yang cenderung konservatif dengan pembangunan dan peningkatan ekonomi serta penegakan demokrasi sebagai agenda utama (Marzaman, 2013). AKP dibentuk oleh Recep Tayyeb Erdogan pada tahun 2001 dan langsung mendapat sambutan baik dari rakyat Turki (Ahmadov, 2008). Harapan baru ini muncul setelah rakyat Turki putus asa terhadap praktek demokrasi yang selalu terhenti setiap kali kelompok Islam memasuki kancah politik. Dimana pemerintahan Erbakan pernah dikudeta oleh militer, dan adanya pembubaran partai-partai Islam seperti Partai Refah dan Partai Fadhilah. Kemudian muncul kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Recep Tayyeb Erdogan yang memerintah untuk pertama kalinya pada tahun 2002

bagaikan sebuah titik yang membalikkan persendian dalam sejarah Turki, belum lagi ‘tuduhan yang diluncurkan kepada Erdogan karena berusaha menghidupkan kembali semangat Ottoman lagi (Taghian, 2012).

Namun kehadiran Erdogan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasannya dalam memimpin Turki membuat para militer gelisah. Pernah sesekali militer Turki memberikan peringatan kepada Erdogan, dimana menurut mereka Erdogan telah menyimpang dari orientasi-orientasi negara. Menurut penjelasan Arthur Goldschmidt, Jr yang dikutip oleh Sidik Jatmika dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, bahwa sekularisme yang dilancarkan Mustafa Kemal didukung penuh oleh angkatan bersenjata Turki. Sampai hari ini pun, militer Turki dikenal sebagai penjaga nilai-nilai sekularisme paling depan dan senantiasa siap untuk memberangus siapa pun yang ingin meruntuhkan nilai-nilai sekularisme Turki tersebut (Jatmika, 2014; Siregar, 2017).

Menurut undang-undang tahun 1982, bahwa unsur-unsur tatanan politik Turki merupakan tatanan demokrasi terbatas yang berlandaskan pada sekularisme Attaturk yang sangat dilindungi oleh militer Turki. Namun kemudian Dampak dari keterbatasan tersebut adalah tidak nampak adanya perubahan yang mendasar pada kehidupan perpolitikan Turki yang terpancar pada kebijakan dalam negeri ataupun luar negeri. Sampai pada gejolak politik memungkinkan untuk melahirkan beberapa celah, militer melakukan intervensi untuk menggugurkannya dan meletakkan kembali permasalahan pada koridornya.

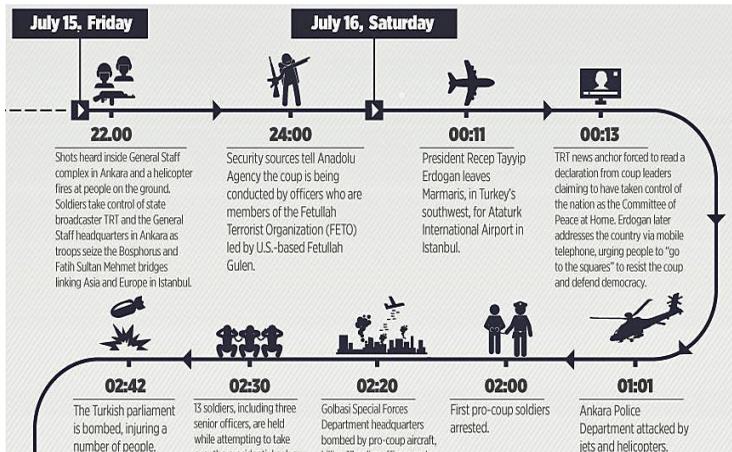
Menjelang pemilihan umum pada tahun 2014, situasi politik semakin memanas. Dimana terdapat dua kasus yang menjadi topik utama pada media-media Turki, yaitu isu pertama mengenai operasi korupsi terhadap pemerintahannya saat itu, yang juga beruntun kepada kasus Negara Paralel yang merujuk kepada sekelompok birokrat yang berafiliasi kepada gerakan Gülen. Dan isu yang kedua mengenai isu-isu trailer yang ditahan di Hatay, perbatasan Turki- Suriah dan disebut

membawa senjata. Penahanan trailer yang disebut-sebut milik IHH dan mengaitkan badan intelijen Turki dan pemerintahan Erdogan-Davutoglu dengan kelompok Al-Qaida yang lekat dengan terorisme. Beberapa oposisi seperti menanam kebencian dan dendam kepada Erdogan, dimana operasi itu juga merupakan suatu usaha diskreditasi AKP, dan yang menjadi target utamanya adalah Erdogan.

Beberapa kekuatan global dalam operasi di Turki dimanfaatkan untuk menggulingkan Recep Tayyep Erdogan. Kekuatan global itu merupakan sebuah koalisi yang digerakkan oleh kaum Neo-Konservatif di Amerika, dimana gerakan ini mendapat dan dari Group KOC, dan dimanfaatkan oleh Partai CHP dan Jamaah Gülen. Aliansi ini sangat menguasai jaringan media Amerika dan juga global, dan menguasai lobby-lobby ekonomi raksasa. Keadaan ini semakin berlanjut, rasa benci kelompok militer Turki yang merupakan penganut sekularisme garis keras (Kemalisme) dan Fethullah Gülen dengan gerakannya (Hizmet) yang menjadi dalang terjadinya kudeta militer Turki yang gagal pada Juli 2016 lalu.

Sesampainya Presiden Erdogan di bandara Istanbul, beliau mengatakan bahwa tindakan kudeta yang terjadi merupakan sebuah tindakan pengkhianatan. Dengan adanya kudeta tersebut Erdogan menyatakan akan melakukan pembersihan bagi siapa saja yang terlibat dalam kudeta tersebut. Kemudian, upaya pembersihan tersebut benar-benar dilakukan yaitu dengan menahan 754 personel angkatan bersenjata Turki, menurunkan 29 perwira berpangkat colonel dan 5 yang berpangkat jenderal dari jabatannya. Selain militer, warga sipil pun terkena dampak pembersihan ini. Sejumlah 15.300 guru dipecat, 1.577 dekan diperintahkan untuk mengundurkan diri serta 8.777 staf kementerian dalam negeri diberhentikan dan 1.500 pegawai kementerian keuangan dipecat. Presiden Erdogan pula dianggap menyimpang dari nilai-nilai HAM karena selain upaya pembersihan tersebut, izin 24 saluran televisi dan stasiun radio dicabut dengan

tuduhan keterkaitan dengan Gulen (BBC News, 2016). Berikut kronologi kudeta militer Turki 2016:



Gambar 2.2: Kronologi Terjadinya Kudeta Militer 2016.

Sumber: <https://jurnalislam.com/inilah-kronologi-lengkap-kudeta-turki/>

Dengan adanya kegentingan yang terjadi dalam negara, Erdogan menetapkan status darurat selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018, namun kemudian Komisi Keamanan Nasional Turki (MGK) menyatakan bahwa status darurat tersebut akan diperpanjang pada 28 September 2016 (Purnama, 2016). Pernyataan MGK tersebut akhirnya dilontarkan secara resmi oleh Erdogan dengan alasan untuk stabilitas negara. Dengan berlakunya status darurat memungkinkan Erdogan beserta kabinetnya untuk mengeluarkan dekrit-dekrit tanpa persetujuan parlemen atau peninjauan yudisial (VOA Indonesia, 2017).

Kemudian setelah terpilih kembalinya Erdogan menjadi ketua partai, digelarlah referendum di Turki mengenai sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer (sistem pemerintahan yang dibangun oleh Mustafa Kemal Attaturk) menjadi sistem presidensial. Referendum tersebut berhasil dimenangkan oleh Erdogan dengan perbedaan hasil yang sangat tipis yaitu 51,4% setuju dan 48,6% tidak setuju.

Kemenangan referendum tersebut melahirkan reformasi pemerintahan Turki yang tergolong sangat besar (Ramdhani, 2017). Hasil referendum yang melahirkan konstitusi baru tersebut meliputi (BBC News, 2017):

- 1) Rancangan konstitusi menetapkan pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019.
- 2) Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode.
- 3) Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk menteri kabinet.
- 4) Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil presiden.
- 5) Jabatan perdana menteri akan dihapus.
- 6) Presiden memiliki wewenang untuk campur tangan dalam peradilan (hal ini merupakan pengaruh Fethullah Gulen yang dituduh sebagai dalang atas terjadinya kudeta pada Juli 2016)
- 7) Presiden akan menetapkan keadaan darurat atau tidak.